

TAJUK RENCANA

Pandemi, Upah dan Daya Beli

MBAN *cindhe mban siladan*. Peribahasa Jawa yang sering dimaknai dalam pengasuhan anak, yang diskriminatif. Ketika anak sulung lebih diutamakan dibanding adiknya. Atau anak laki-laki lebih diutamakan dalam segalanya, dibandingkan anak perempuan. Atau bisa jadi, anak yang sukses, kaya, berpangkat yang selalu disebut dalam setiap pembicaraan dibanding anak yang lain. 'Ketidakadilan' yang tanpa sadar diciptakan orang tua, yang sejalannya bisa berbahaya.

Sebuah pemahaman leluhur yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Kearifan lokal nenek moyang yang tak lekang dimakan zaman. Kini perilaku *mban cindhe mban siladan* ini dirasakan para buruh ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran No 11/HK04/XI-2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19. Atas dasar SE tersebut, Menteri Ida Fauziyah meminta para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.

SE inilah yang membuat buruh merasa pemerintah bersikap *mban cindhe mban siladan*, lebih mementingkan pengusaha. Bukan tidak memahami kesulitan pengusaha pada masa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir, namun kehidupan buruh sebagai *wong cilik* jelas lebih sulit, menjadi dalihnya. Bahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menilai keputusan itu menunjukkan Menteri Ida tidak memiliki sensitivitas terhadap buruh dan cenderung memanjakan pengusaha.

Karena diserahkan kepada gubernur dalam melakukan penyesuaian, ada hal yang cukup menyekalkan di beberapa daerah. Dengan

mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 3,5%. Bahkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi didapatkan angka 3,33%, namun Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menyebutkan : "oleh Pak Gubernur angka itu dibulatkan menjadi 3,5%." Sehingga UMP DIY 2021 menjadi Rp 1.765.000 dari tahun 2020 Rp 1.704.608." Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga memilih tetap menaikkan UMP tahun 2021 sebesar 3,27%. Sehingga UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979,12 setelah di tahun 2020 sebesar Rp1.742.015. (KR, 1/11)

Apa yang terjadi ini mengajarkan kepada kita, bila penyesuaian yang diberikan kepada gubernur bisa luwes dilaksanakan dengan memahami situasi dan kondisi yang ada di masa pandemi. Sesuai Peraturan Pemerintah No 78/2015, UMP sebagai jaring pengaman sosial, merupakan kewenangan kepala daerah. Dalam ketentuan perundangan, PP memiliki derajat lebih tinggi daripada SE. Jadi ini bukan 'melawan' SE. Tentu, kebijakan Gubernur DIY dan Gubernur Jawa Tengah dilakukan dengan pertimbangan mendalam. Karena hal ini sangat berkait erat pula dengan daya beli masyarakat dalam masa pandemi Covid-19. Agar situasi ekonomi tidak semakin terjung bebas.

Buruh adalah rakyat jelata, *wong cilik*. Maka realita lain bisa kita pahami. Gubernur DIY yang juga Sultan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memenuhi komitmennya *tahta untuk kesejahteraan rakyat*. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki komitmen memperjuangkan *wong cilik*. Mungkin, ini akan menjadi oase menyejukan di tengah keprihatinan serta keluhan mengenai pemimpin yang sulit mendengarkan suara rakyat. □

Relaksasi Bermedia untuk Produktif

Thoriq Tri Prabowo

MEDIA sosial (medsos) kini menjadi salah satu piranti yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak hanya untuk keperluan hiburan sebagaimana pada awal kemunculannya, medsos di masa pandemi Covid-19, menjelma menjadi perangkat multiguna. Kegiatan belajar, pertemuan bisnis, dan transaksi informasi lainnya bisa dilakukan dengan mudah di medsos.

Fenomena di atas berimbas pada meningkatnya interaksi manusia dengan gawainya, yang praktis juga meningkatkan konsumsi kuota data internet dan daya listrik. Tidak hanya persoalan pembengkakan biaya, penggunaan medsos secara masif juga berimplikasi pada kesehatan baik dalam konteks fisik maupun psikis. Skema *work from home* (bekerja dari rumah) atau *school from home* (sekolah dari rumah) dan terma sejenis itu ternyata menimbulkan persoalan baru, yaitu kelelahan bermedia.

Transisi

Kelelahan bermedia ini terjadi karena transisi aktivitas luring ke daring dalam porsi yang ekstrem. Dalam konteks ini, publik perlu melakukan semacam relaksasi dalam bermedia agar terhindar dari segala dampak buruk yang dapat terjadi karenanya. Adapun beberapa ancaman kesehatan fisik lantaran kelelahan bermedia antara lain: kesehatan mata karena menatap gawai, kondisi tulang tertentu karena berada pada satu posisi untuk waktu yang lama, pancaran radiasi dari gawai, dan persoalan kesehatan fisik lainnya. Kemudian secara psikis, publik juga terancam menderita kecemasan, kesulitan tidur, keterlambatan kemampuan berinteraksi sosial, serta persoalan kesehatan psikis lainnya.

Salah satu dampak dari hampir segala hal direorientasi ke ruang virtual ialah berkurangnya pengalaman hidup. Mula-mula teknologi seperti mampu menggantikan segalanya. Akan tetapi kebu-

tuhan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru ternyata tidak sepenuhnya bisa didapatkan melalui teknologi. Sehingga tidak heran apabila belakangan ini kultur hidup sehat dengan berolahraga dan bercocok tanam seperti menggeliat lagi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa publik sebenarnya tidak hanya lelah tetapi juga mengalami kejujutan dalam bermedia.

Sampai dengan saat ini memang kebijakan melakukan pelbagai tugas melalui



KR-JOKO SANTOSO

gawai masih menjadi solusi satu-satunya untuk mencegah persebaran di tengah meningkatnya angka positif Covid-19. Namun kebijakan tersebut perlu disertai dengan kearifan serta cara pandang yang transformatif. Cara pandang konvensional yang memandang bahwa transisi tersebut hanya berkaitan dengan lokus saja justru akan mengurangi produktivitas. Sebagai contoh terkait jam kerja, pekerjaan yang dilakukan di rumah mungkin tidak memerlukan ikatan waktu yang sama persis sebagaimana di kantor atau sekolah. Adapun orientasi

bekerja atau belajar dari dalam konteks daring tersebut adalah hasil, bukan kelengkapan administratif belaka.

Produktif

Salah satu contoh kebijaksanaan seperti yang disebutkan di atas tersebut dapat mencegah publik dari kelelahan bermedia. Namun satu kebijaksanaan saja tentu tidak akan cukup. Salah satu gangguan terbesar yang mampu melipatgandakan waktu penggunaan gawai ialah ketidaktifan dalam bekerja daring. Sehingga relaksasi dalam bermedia mutlak dibarengi dengan kedisiplinan dalam bekerja agar penggunaan gawai benar-benar untuk hal yang produktif saja. Relaksasi ini bukan bermakna untuk meninggalkan kewajiban pekerjaan yang saat ini didominasi melalui media daring. Melainkan untuk mengurangi sedikit demi sedikit penggunaan gawai untuk keperluan yang tidak begitu produktif.

Selain membunuh kebosanan, melakukan aktivitas fisik dapat menjauhkan publik dari kelelahan bermedia. Melakukan pelbagai aktivitas fisik seperti berolahraga menjadi salah satu cara sehat untuk relaksasi. Selain menyehatkan, aktivitas fisik ini juga akan menjadi semacam terapi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai di waktu senggang. Kendati demikian aktivitas fisik harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. □

*) **Thoriq Tri Prabowo MIP**, Dosen Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini@kr.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mengkritisi 'Korting' Hukuman Koruptor

Yulianta Saputra

NASIB pemberantasan korupsi di Indonesia kian suram. Komitmen eradikasi korupsi mengalami regresi menyusul maraknya 'sunat' hukuman sejumlah koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat peninjauan kembali (PK).

Kala negeri ini masih dilanda duka imbas adanya pagebluk Covid-19 yang belum dimahaminya kapan pastinya usai, kita malah disuguhkan warta memprihatinkan : 'diskon' besar-besaran atas hukuman terpidana kasus korupsi oleh MA

Teranyar, MA mengabulkan PK mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mengurangi hukuman yang bersangkutan dari 14 tahun pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara. Putusan PK Anas tersebut memperpanjang senarai koruptor yang mendapat 'korting' dari MA lantaran sebelumnya KPK mencatet setidaknya ada 20 orang terdakwa kasus korupsi yang mendapat keringanan *punishment* di tingkat MA.

Minus Komitmen

Kita tentu amat menyesalkan kian jamak saja putusan MA di tingkat PK yang dikabulkan majelis. Padahal, sebagai garda terakhir bagi para pencari keadilan, fenomena ini akan memberikan citra buruk di hadapan khalayak yang semakin kritis terhadap putusan pengadilan. Pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilan itu sendiri sangat berpotensi mengalami declinasi.

Menyigi vonis MA dalam kurun waktu terakhir ini, terlihat dengan tandas bahwa institusi kehakiman tertinggi *a quo* sangat minus dalam ihwal komitmen antikorupsi. Konklusi ini didukung dengan bukti-bukti berupa meruyaknya 'diskon' vonis hukuman koruptor. Praktik memangkas hukuman koruptor

tersebut terjadi pada beberapa kasus besar dan menarik masyarakat yang melibatkan elite politik, birokrat, dan pengusaha kakap.

Bukti sahih lainnya ialah catatan riset dari Indonesia Corruption Watch (ICW) perihal vonis ringan koruptor yang masih terjadi hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, besaran vonis rerata di semua tingkat yakni pengadilan tingkat pertama (PN), pengadilan tingkat banding (PT), dan pengadilan tingkat kasasi/PK (MA) adalah 2 tahun 7 bulan. Angka ini hanya meningkat sedikit (baca: 2 bulan) dari rata-rata vonis pada 2018 yakni 2 tahun 5 bulan.

Tidak berhenti sampai di situ. Dikaji dari gatra pemulihan kerugian negara juga sangat minim. Jikalau ditotal, negara telah rugi dari dampak praktik korupsi pada sepanjang tahun 2019 mencapai sebesar Rp 12 triliun. Akan tetapi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya sampai Rp 750 miliar.

Artinya, Sepuluh persennya saja tidak ada. Dari ekspirasi tersebut, MA tak cuma ramah terhadap koruptor, melainkan telah kandas menciptakan keadilan dalam kasus korupsi.

Efek Jera

'Korting' hukuman koruptor begitu terang benderang meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat. Seakan, kerja keras penegak hukum kian muspra. Deretan putusan yang mereduksi hukuman perkara korupsi tersebut tentu amat terlihat tidak

kongruen dengan upaya bersama semua pihak dalam rangka perang melawan korupsi. Bagaimanapun, tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Untuk memeranginya dibutuhkan pula upaya penangan yang luar biasa (*extraordinary efforts*). Maka, salah satu usaha penangulangannya adalah dengan pemberian efek jera terhadap hukuman para koruptor. Sehingga calon pelaku lain tidak akan melakukan perihal yang serupa.

Hakim mesti lebih banyak menyelami rasa keadilan di masyarakat, kian kreatif dan inovatif, serta semakin ditopang dengan analisis jua argumentasi komprehensif. Era telah berubah, kejahatan kian canggih, hakim harus jadi motor perubahan. Hakim bukan kaum gampang memberikan 'korting.' Kalau hakim gampang, MA mudah memberi potongan, jangsan-jangan ada *judicial corruption*? □

*) **Yulianta Saputra SH MH**, pegiat antikorupsi; esais alumnus UMY-UGM

Pojok KR

Di tengah pro-kontra SE Menaker, UMP DIY dan Jateng naik
-- **Selalu ada kabar menyejukan** ***

Hotel jangsan aji mumpung
-- **Ingat ketika sepi, jangsan sampai terulang** ***

Uji coba pedestrian Malioboro 3-15 November
-- **Pahami rutinya, jangsan salah jalan**

Beraks



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Peran Guru dalam PJJ

PANDEMI Covid-19 yang sampai saat ini belum usai telah memberikan banyak sekali perubahan, salah satunya dalam hal pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, kini digantikan dengan pembelajaran jarak jauh secara daring.

Pembelajaran daring yang sudah berjalan selama kurang lebih tujuh bulan ini menemui banyak kendala, baik yang dialami oleh peserta didik, orangtua maupun guru. Banyak peserta didik yang merasa bosan dengan pembelajaran daring dan menginginkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah segera dimulai.

Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), pembelajaran tidak hanya bertujuan membuat peserta didik menguasai materi pelajaran saja, tapi juga bagaimana menyesuaikan bagi peserta didik. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk berinovasi agar peserta didik selalu antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran.

Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, guru perlu memberikan perhatian kepada peserta didik. Perhatian ini bisa ditunjukkan dengan menyapa, memberikan umpan balik ataupun melayani konsultasi.

Menyapa peserta didik secara pribadi bisa melalui *voice note*, pesan pribadi atau saat pertemuan sinkronus (google meet/zoom meeting). Hal ini dapat membuat peserta didik merasa diperhatikan oleh guru sehingga semangat peserta didik akan muncul.

Menyapa peserta didik dapat juga dilakukan ketika peserta didik mengumpulkan tugas ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saat peserta didik mengirimkan tugas online, guru perlu memberikan umpan balik yang disertai dengan saran dan pesan yang memotivasi peserta didik. Saran dapat berupa penjelasan pengerjaan yang benar jika peserta didik melakukan kesalahan dalam pengerjaan tugas.

Dalam pembelajaran jarak jauh ini masing-masing peserta didik tentunya mengalami kendala yang berbeda-beda. Kendala tersebut dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah untuk mendapatkan solusi terbaik. Komunikasi yang baik perlu terjalin antara orangtua dengan pihak sekolah demi kemajuan peserta didik. □

Futikha Hanum SPd
Guru SDN Kalasan 1, Sleman.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkry23@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Cunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.